

ETIKA PUBLIK DAN TAFSIR POPULER: TANTANGAN DAKWAH QUR'ANI DI ERA MEDIA SOSIAL

Abid Nurhuda

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia
Email: abidnurhuda@mhs.ptiq.ac.id

Inamul Hasan Ansori

Universitas Al Azhar Kairo, Egypt
Email: ansorihafidz92@gmail.com

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mengubah secara fundamental lanskap dakwah dan praktik penafsiran Al-Qur'an di ruang publik kontemporer. Dakwah tidak lagi berlangsung dalam ruang otoritatif yang terkontrol, melainkan beroperasi dalam ekosistem digital yang ditandai oleh logika algoritma, kecepatan distribusi, dan kompetisi atensi. Artikel ini bertujuan menganalisis fenomena dakwah Al-Qur'an di media sosial dengan menyoroti dinamika tafsir populer, pergeseran otoritas keagamaan, serta implikasi etis dan epistemologis yang menyertainya. Melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dan analisis konseptual, penelitian ini menempatkan praktik dakwah digital dalam kerangka ilmu tafsir dan etika publik Qur'ani. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial berperan ganda: di satu sisi memperluas akses masyarakat terhadap pesan-pesan Al-Qur'an, namun di sisi lain berpotensi mereduksi kompleksitas makna wahyu menjadi narasi simplistik, fragmentaris, dan sering kali polemis. Absennya kerangka etika tafsir yang memadai menjadikan tafsir populer rentan terhadap banalitas makna dan polarisasi sosial. Artikel ini menegaskan pentingnya rekonstruksi etika dakwah Qur'ani yang berlandaskan maqāṣid al-sharī'ah, tanggung jawab epistemologis, dan kesadaran sosial, agar media sosial tidak sekadar menjadi ruang ekspresi religius, tetapi juga wahana pembentukan kesadaran keagamaan yang inklusif, reflektif, dan berkeadaban.

Kata Kunci: Etika Publik, Tafsir Populer, Dakwah Qur'ani, Media Sosial

Abstract

The rise of social media has fundamentally transformed the landscape of Islamic preaching and the practice of Qur'anic interpretation in the contemporary public sphere. Islamic preaching no longer takes place within controlled, authoritative spaces, but operates within a digital ecosystem characterised by algorithmic logic, rapid distribution, and competition for attention. This article aims to analyse the phenomenon of Qur'anic da'wah on social media by highlighting the dynamics of

popular exegesis, the shift in religious authority, and the accompanying ethical and epistemological implications. Through a qualitative approach based on literature review and conceptual analysis, this study situates digital da'wah practices within the framework of Qur'anic exegesis and public ethics. The findings indicate that social media plays a dual role: on the one hand, it broadens public access to Qur'anic messages; on the other, it risks reducing the complexity of revelatory meaning to simplistic, fragmentary, and often polemical narratives. The absence of an adequate ethical framework for exegesis renders popular exegesis vulnerable to the trivialisation of meaning and social polarisation. This article emphasises the importance of reconstructing Qur'anic da'wah ethics grounded in the maqāṣid al-sharī'ah, epistemological responsibility, and social consciousness, so that social media does not merely serve as a space for religious expression, but also as a vehicle for fostering an inclusive, reflective, and civilised religious consciousness.

Keywords: *Public Ethics, Popular Exegesis, Qur'anic Da'wah, Social Media*

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental lanskap komunikasi publik, termasuk di dalamnya praktik dakwah dan transmisi makna keagamaan. Ruang publik yang sebelumnya dimediasi oleh institusi formal seperti masjid, majelis taklim, pesantren, dan media cetak kini bergeser ke ruang digital yang cair, cepat, dan sering kali tanpa mekanisme otoritatif yang mapan.¹ Dalam konteks ini, Al-Qur'an sebagai sumber normatif utama. Islam tidak lagi hanya hadir melalui tafsir-tafsir akademik dan karya ulama klasik, tetapi juga melalui potongan ayat, narasi singkat, meme religius, video pendek, dan ceramah viral yang beredar luas di media sosial.² Transformasi ini menghadirkan peluang besar bagi penyebaran nilai Qur'ani, sekaligus tantangan serius terhadap etika publik dan tanggung jawab penafsiran.

Fenomena tersebut melahirkan apa yang dapat disebut sebagai tafsir populer yakni bentuk penafsiran Al-Qur'an yang dikonstruksi, disederhanakan, dan disebarluaskan melalui medium digital untuk konsumsi khalayak luas. Tafsir populer tidak selalu hadir dalam format kitab atau karya ilmiah, melainkan dalam bentuk narasi ringkas yang persuasif, emosional, dan sering kali normatif.³ Ia bekerja bukan hanya sebagai penjelasan makna ayat, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan opini, legitimasi moral, bahkan mobilisasi sosial.⁴ Di sinilah

¹ Stewart M. Hoover, *The Media and Religious Authority* (Philadelphia: Penn State University Press, 2016), hal. 42.

² Heidi A. Campbell and Ruth Tsuria, *Digital Religion Understanding Religious Practice in Digital Media* (United Kingdom: Routledge, 2022), hal. 88.

³ Stig Hjarvard, *The Mediatization of Culture and Society* (New York: Routledge, 2013), hal. 181.

⁴ Nasr Abu-Zayd, *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics* (Utrecht: Humanistics University Press, 2006), hal. 96.

persoalan etika publik menjadi krusial: sejauh mana tafsir populer tetap berpegang pada prinsip keilmuan, keadilan makna, dan kemaslahatan sosial, ketika ia beroperasi dalam logika algoritma, atensi, dan viralitas.

Dalam tradisi keilmuan Islam, aktivitas penafsiran Al-Qur'an tidak pernah dipahami sebagai praktik bebas nilai.⁵ Sejak periode klasik, para mufassir menekankan prasyarat epistemologis, etis, dan metodologis dalam memahami teks wahyu, mulai dari penguasaan bahasa Arab, konteks asbāb al-nuzūl, hingga tanggung jawab moral terhadap dampak sosial dari penafsiran. Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa penyampaian kebenaran harus dilakukan dengan *hikmah*, *mau'izhah hasanah*, dan *dialog yang etis* (Q.S. al-Nahl [16]: 125).⁶ Prinsip ini menunjukkan bahwa dakwah Qur'ani sejak awal mengandung dimensi etika publik, yakni kesadaran bahwa pesan keagamaan selalu berinteraksi dengan ruang sosial yang plural dan dinamis.

Namun, dalam konteks media sosial, relasi antara tafsir, dakwah, dan etika publik mengalami pergeseran signifikan. Logika media digital cenderung menekankan kecepatan, simplifikasi, dan polarisasi, yang tidak selalu sejalan dengan karakter tafsir Al-Qur'an yang kompleks, kontekstual, dan dialogis. Akibatnya, ayat-ayat Al-Qur'an kerap dipotong dari konteksnya, dipersempit maknanya, atau diarahkan untuk membenarkan kepentingan tertentu, baik politik, ideologis, maupun ekonomi.⁷ Praktik semacam ini bukan hanya berpotensi melahirkan reduksionisme makna, tetapi juga dapat memicu konflik sosial, stigmatisasi kelompok lain, dan erosi kepercayaan publik terhadap otoritas keagamaan.

Di sisi lain, menolak sepenuhnya tafsir populer juga bukan pilihan yang produktif. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim kontemporer, termasuk generasi muda yang menjadikan ruang digital sebagai sumber utama pengetahuan keagamaan.⁸ Oleh karena itu, tantangan utama dakwah Qur'ani di era media sosial bukanlah antara “tafsir akademik” versus “tafsir populer”, melainkan bagaimana membangun jembatan etis dan epistemologis antara keduanya. Pertanyaannya kemudian bergeser dari apakah tafsir populer boleh hadir, menjadi bagaimana tafsir populer dapat dikembangkan secara bertanggung jawab, etis, dan tetap setia pada spirit Al-Qur'an sebagai rahmatan *li al-‘ālamīn*.

Kajian-kajian terdahulu tentang dakwah digital dan Islam di media sosial umumnya menyoroti aspek teknologi, strategi komunikasi, dan perubahan otoritas keagamaan. Sebagian menekankan demokratisasi pengetahuan agama, sementara yang lain menggarisbawahi fragmentasi otoritas dan meningkatnya populisme religius. Meski demikian, dimensi etika publik dalam tafsir populer khususnya

⁵ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah* (Oxford: Oxford University Press, 2017), hal. 117.

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Da'wah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hal. 42.

⁷ Farid Esack, *Quran, Liberation & Pluralism* (USA: Oneworld Publications, 2003), hal. 185.

⁸ Ihsan Yilmaz, “Faith in the Digital Age: How Young Muslims Use the Cyberspace for Islamic Knowledge,” in *Between Clicks and Clerics: How Young Western Muslims Seek Religious Knowledge in the Digital Age* (Singapura: Springer Nature Singapore, 2025), 63–121.

dalam perspektif ilmu tafsir Al-Qur'an masih relatif kurang mendapatkan perhatian serius.⁹ Banyak studi berhenti pada analisis fenomenologis, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan prinsip-prinsip etis penafsiran Al-Qur'an dan implikasinya bagi kehidupan publik yang plural.

Artikel ini berangkat dari kesenjangan tersebut dengan menempatkan etika publik sebagai lensa utama dalam membaca fenomena tafsir populer di media sosial. Etika publik di sini dipahami sebagai seperangkat nilai normatif yang mengatur relasi antara ekspresi keagamaan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan harmoni dalam ruang publik.¹⁰ Dalam kerangka ini, tafsir Al-Qur'an tidak hanya dinilai dari ketepatan linguistik atau kesahihan riwayat, tetapi juga dari dampak sosialnya: apakah ia mendorong keadilan, moderasi, dan empati, atau justru memperkuat eksklusivisme dan konflik.

Dengan demikian, tujuan utama artikel ini adalah menganalisis secara kritis relasi antara etika publik dan tafsir populer dalam konteks dakwah Qur'ani di era media sosial. Artikel ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar: bagaimana karakter tafsir populer yang berkembang di media sosial Muslim kontemporer? Tantangan etis apa saja yang muncul dari praktik penafsiran tersebut? Dan bagaimana prinsip-prinsip tafsir Al-Qur'an dapat ditransformasikan menjadi kerangka etika publik yang relevan dengan dinamika media digital? Melalui pendekatan konseptual-kritis, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi tafsir kontemporer, sekaligus kontribusi praktis bagi dakwah Qur'ani yang lebih beretika, inklusif, dan bertanggung jawab di ruang publik digital.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian konseptual-kritis (*conceptual critical research*), yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam relasi antara tafsir Al-Qur'an, etika publik, dan praktik dakwah di era media sosial. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak terletak pada pengukuran kuantitatif atau generalisasi statistik, melainkan pada penggalian makna, kerangka normatif, dan problem epistemologis yang muncul dari fenomena tafsir populer dalam ruang publik digital.¹¹ Dalam tradisi ilmu-ilmu keislaman, khususnya studi tafsir, pendekatan kualitatif-konseptual dipandang paling relevan untuk membaca dinamika interpretasi teks suci yang selalu berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang berubah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Tafsir al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, Ibn Kathīr, serta pemikir

⁹ Muhammad Amin Abdullah, "Islamic Studies in Higher Education in Indonesia: Challenges, Impact and Prospects for the World Community," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 2 (2017): 391–426, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.391-426>.

¹⁰ Eva F Nisa, "Creative and Lucrative Da'wa: The Visual Culture of Instagram amongst Female Muslim Youth in Indonesia," *Asiascape: Digital Asia* 5, no. 1–2 (2018): 68–99.

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hal. 28.

kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, dan Abdullah Saeed. Sedangkan data sekunder mencakup literatur interdisipliner yang relevan dengan tema penelitian, seperti kajian etika publik, komunikasi dakwah, media digital, dan studi agama kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dan terarah.¹² Proses ini mencakup penelusuran literatur primer dan sekunder melalui basis data akademik bereputasi, seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, dengan kriteria seleksi yang ketat. Literatur yang dipilih diprioritaskan pada karya yang memiliki relevansi langsung dengan tafsir Al-Qur'an, etika publik, dan dakwah digital, serta diterbitkan oleh penerbit atau jurnal yang kredibel.

Analisis data dilakukan melalui metode analisis tematik-kritis. Dan untuk menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, artikel ini menerapkan strategi *theoretical triangulation*, yakni dengan mempertemukan berbagai perspektif teoretis sehingga diharapkan tidak bersifat sepihak atau reduksionistik.¹³ Secara tidak langsung, penelitian ini menawarkan kerangka analitis dan refleksi kritis yang dapat digunakan sebagai rujukan konseptual. Metode ini memungkinkan pembacaan yang mendalam dan bernuansa terhadap tantangan dakwah Qur'ani di era media sosial, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris maupun komparatif di masa mendatang. Berikut langkah-langkah operasional yang dilakukan:

1. Peneliti memulai dengan tidak memandang konten dakwah di TikTok atau Instagram sekadar sebagai "video keagamaan". Peneliti menggunakan kacamata sosiologi komunikasi (*mediatization of religion*) untuk membongkar bahwa tafsir populer di media sosial adalah sebuah transformasi diskursif. Peneliti melacak bagaimana ayat-ayat yang sejatinya kompleks direduksi (*disederhanakan*) agar sesuai dengan logika algoritma yang memuja engagement (*keterlibatan*), kecepatan, dan viralitas.
2. Peneliti mengumpulkan literatur tentang otoritas keagamaan, lalu membenturkannya dengan fenomena digital. Secara operasional, peneliti mengamati bagaimana legitimasi keilmuan (yang secara klasik dibangun lewat sanad keilmuan dan otoritas ulama) kini digeser oleh apa yang disebut sebagai *algorithmic authority*—sebuah otoritas yang ditentukan oleh jumlah pengikut dan hitung-hitungan netral semu algoritma. Di sinilah peneliti menemukan akar ketegangan antara demokratisasi (di mana siapa saja bisa menafsirkan Al-Qur'an) dan hilangnya kedalaman epistemologis.
3. Peneliti membuka data primernya—ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir (seperti al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan Ibn Kathīr). Secara sistematis, peneliti mengekstraksi prinsip-prinsip etika publik yang dikandung teks suci. Operasionalisasinya adalah dengan merumuskan bahwa etika publik Qur'ani bersandar pada empat pilar: keadilan (*al-'adl*), moderasi

¹² Ahsan Ullah and Kanwal Ameen, "Account of Methodologies and Methods Applied in LIS Research: A Systematic Review," *Library & Information Science Research* 40, no. 1 (2018): 53-60.

¹³ Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* (New York: Routledge, 1994), hal. 41, <https://doi.org/10.4324/9780429304651>.

- (wasatiyyah), tanggung jawab moral (qawl sadīd), dan tujuan kemaslahatan (maqāṣid al-sharī'ah).
4. Peneliti menggunakan keempat prinsip ini sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi praktik tafsir populer di media sosial: Apakah penafsiran yang viral itu adil? Apakah ia moderat, atau justru menyebarkan ekstremisme dan polarisasi?
 5. Peneliti membedah praktik penafsiran di media sosial. Hasilnya operasionalnya menunjukkan bahwa demi mengejar popularitas, tafsir sering kali terpotong dari konteks sejarah asalnya (ahistoris) dan direduksi menjadi slogan hitam-putih. Lebih jauh, peneliti menemukan bahwa reduksi ini berujung pada polarisasi makna yang berbahaya, di mana ayat-ayat suci dipakai untuk menciptakan ruang echo chamber dan melegitimasi klaim kebenaran kelompok (eksklusivisme), yang jelas-jelas melanggar prinsip al-Qur'ān yufassiru ba'duhu ba'dan (ayat menafsirkan ayat lain) dan tujuan rahmat bagi semesta (rahmatan lil alamin).
 6. Peneliti kemudian menyoroti aktor utamanya: sang pendakwah. Secara analitis, peneliti memetakan dilema moral yang dihadapi pendakwah digital, yakni terjepit antara dorongan mengejar atensi massal (logika popularitas/komodifikasi) dan kewajiban menjaga kejujuran epistemologis serta integritas pesan Al-Qur'an (tanggung jawab moral).
 7. Peneliti Merumuskan Jalan Keluar

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tafsir Populer sebagai Fenomena Diskursif Digital

Munculnya tafsir populer di media sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pergeseran medium dakwah, melainkan sebagai transformasi diskursif dalam cara makna Al-Qur'an diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi di ruang publik. Dalam konteks digital, tafsir tidak lagi hadir terutama sebagai produk keilmuan yang lahir dari proses panjang kajian filologis dan metodologis, tetapi sebagai wacana yang bersaing dalam ekosistem atensi.¹⁴ Media sosial bekerja dengan logika algoritmik yang menempatkan visibilitas, keterlibatan (*engagement*), dan kecepatan sebagai parameter utama, sehingga tafsir Al-Qur'an yang berkembang di dalamnya cenderung mengalami simplifikasi dan penyesuaian dengan selera audiens.

Sebagai fenomena diskursif, tafsir populer dapat dipahami melalui kerangka *mediatization of religion*, yaitu proses ketika praktik dan simbol keagamaan semakin dibentuk oleh logika media. Dalam kerangka ini, Al-Qur'an tidak hanya diposisikan sebagai teks suci, tetapi juga sebagai konten yang harus “menarik”, “mudah dibagikan”, dan “relevan secara emosional”.¹⁵ Akibatnya, ayat-ayat tertentu lebih sering diangkat karena memiliki daya sugestif tinggi, sementara ayat-ayat yang menuntut pembacaan kontekstual dan reflektif cenderung terpinggirkan.

¹⁴ Nick Couldry and Andreas Hepp, *The Mediated Construction of Reality* (New York: Polity Press, 2016), hal. 24.

¹⁵ Gary R Bunt, *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority* (New York: University of North Carolina Press, 2018).

Proses ini menandai pergeseran penting dari tafsir sebagai aktivitas epistemik menuju tafsir sebagai praktik komunikasi massa.

Dalam tradisi tafsir klasik, diskursus penafsiran berkembang dalam ruang ilmiah yang relatif terjaga, dengan mekanisme otoritas yang jelas melalui sanad keilmuan, reputasi intelektual, dan pengakuan komunitas ulama. Tafsir populer di media sosial, sebaliknya, beroperasi dalam ruang yang lebih cair dan egaliter, di mana siapa pun dapat mengklaim otoritas penafsiran tanpa prasyarat metodologis yang memadai.¹⁶ Kondisi ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai fragmentasi otoritas tafsir, yakni situasi di mana kebenaran interpretatif tidak lagi ditentukan oleh argumentasi ilmiah, melainkan oleh popularitas dan jumlah pengikut.

Fragmentasi tersebut tidak sepenuhnya negatif. Di satu sisi, ia membuka akses luas terhadap Al-Qur'an dan memungkinkan partisipasi publik dalam diskursus keagamaan. Banyak Muslim yang sebelumnya jauh dari literatur tafsir kini dapat berinteraksi langsung dengan ayat-ayat Al-Qur'an melalui medium digital.¹⁷ Namun di sisi lain, tanpa kerangka etika dan metodologi yang jelas, tafsir populer berpotensi menjadi sarana legitimasi bagi pandangan sempit, bias ideologis, bahkan ujaran kebencian yang dibungkus dengan dalil keagamaan. Di sinilah letak ketegangan utama antara demokratisasi penafsiran dan tanggung jawab etis dalam menyampaikan pesan Qur'ani.

Lebih jauh, tafsir populer di media sosial sering kali mengaburkan batas antara tafsir, opini personal, dan retorika dakwah. Ayat Al-Qur'an digunakan sebagai penguat argumen yang telah disimpulkan sebelumnya, bukan sebagai teks yang dibaca secara terbuka dan dialogis. Pola ini menunjukkan pergeseran fungsi tafsir dari upaya memahami kehendak ilahi menjadi alat justifikasi moral.¹⁸ Dalam perspektif etika publik, praktik semacam ini problematik karena berpotensi menutup ruang dialog dan memperkuat klaim kebenaran tunggal di tengah masyarakat yang plural.

Dari sudut pandang ilmu tafsir, problem utama tafsir populer bukan terletak pada bentuk ringkas atau bahasa yang sederhana, melainkan pada hilangnya kesadaran hermeneutik. Kesadaran bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam konteks sejarah tertentu, berbicara dengan ragam audiens, dan memiliki lapisan makna yang tidak selalu dapat direduksi menjadi slogan normatif sering kali diabaikan.¹⁹ Padahal, mufassir klasik maupun kontemporer menekankan pentingnya tadabbur dan kehati-hatian dalam menisbatkan makna kepada teks wahyu, terutama ketika makna tersebut disebarluaskan ke ruang publik.

¹⁶ Noam Gal, "Ironic Humor on Social Media as Participatory Boundary Work," *New Media & Society* 21, no. 3 (2019): 729–49.

¹⁷ Rofiqoh Nurul Ashfiya, "New Direction of the Qur'an Interpretation in Indonesia: A Study of Nadirsyah Hosen's Interpretation on Social Media," *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 165–184.

¹⁸ Jared Piazza and Justin F. Landy, "Lean Not on Your Own Understanding": Belief That Morality Is Founded on Divine Authority and Non-Utilitarian Moral Judgments," *Judgment and Decision Making* 8, no. 6 (2013): 639–661.

¹⁹ Salman Faris, "Exploring the Divine Message: Quranic Studies in the Context of Islamic Scholarship," *Dirasah International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 111–125.

Dengan demikian, tafsir populer sebagai fenomena diskursif digital menuntut pembacaan ulang terhadap relasi antara teks, penafsir, dan publik. Ia bukan sekadar gejala komunikasi, tetapi medan etis yang menentukan bagaimana Al-Qur'an hadir dalam kehidupan sosial kontemporer. Tanpa kerangka etika publik yang kuat, tafsir populer berisiko mereduksi pesan Qur'ani menjadi instrumen simbolik yang kehilangan daya transformatifnya. Sebaliknya, dengan pendekatan etis dan metodologis yang tepat, tafsir populer justru dapat menjadi jembatan antara khazanah tafsir akademik dan kebutuhan spiritual masyarakat modern.

Otoritas Keagamaan dan Algoritma Media Sosial

Salah satu implikasi paling signifikan dari menguatnya tafsir populer di media sosial adalah terjadinya pergeseran otoritas keagamaan dari struktur tradisional menuju mekanisme digital yang bersifat algoritmik. Dalam konteks klasik, otoritas tafsir Al-Qur'an dibangun melalui proses panjang yang melibatkan transmisi keilmuan, penguasaan metodologi, dan pengakuan komunitas ilmiah.²⁰ Ulama dan mufassir memperoleh legitimasi bukan semata-mata karena kemampuan retorik, tetapi karena konsistensi metodologis dan integritas moral yang teruji. Media sosial, sebaliknya, membentuk otoritas baru yang ditentukan oleh visibilitas, jumlah pengikut, dan tingkat interaksi pengguna, yang semuanya dikalkulasi oleh algoritma platform.²¹

Algoritma media sosial bekerja dengan prinsip netral semu (*apparent neutrality*), yakni mengklaim objektivitas teknologis padahal sesungguhnya beroperasi berdasarkan logika ekonomi-politik atensi. Konten yang dianggap "relevan" oleh algoritma bukanlah konten yang paling akurat atau etis, melainkan yang paling mampu mempertahankan perhatian pengguna.²² Dalam konteks dakwah Qur'ani, kondisi ini mendorong munculnya penafsir-penafsir instan yang mengemas ayat Al-Qur'an dalam format sensasional, konfrontatif, atau emosional agar sesuai dengan selera algoritmik. Akibatnya, kualitas penafsiran sering kali dikorbankan demi keterjangkauan dan popularitas.²³

Pergeseran ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai *algorithmic authority*, yaitu bentuk otoritas baru yang tidak berakar pada legitimasi keilmuan, tetapi pada kalkulasi teknis platform digital. Dalam kerangka ini, seorang pendakwah atau penafsir dianggap "berotoritas" bukan karena kedalaman ilmunya, melainkan karena kemampuannya menyesuaikan pesan keagamaan dengan logika

²⁰ Nick Couldry, *Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice* (United Kingdom: Polity Press., 2012), hal. 132.

²¹ Bryan S. Turner, *Religion and Modern Society: Citizenship, Secularisation and the State* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2011), hal. 103.

²² Nick Schuster and Seth Lazar, "Attention, Moral Skill, and Algorithmic Recommendation," *Philosophical Studies* 182, no. 1 (2025): 159-184.

²³ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: AN OBSERVER BEST BOOK OF THE CENTURY* (New York: PublicAffairs, 2019).

viralitas.²⁴ Fenomena ini berimplikasi langsung terhadap cara Al-Qur'an dipahami dan dipresentasikan kepada publik, karena tafsir yang kompleks dan bernuansa sering kali kalah bersaing dengan tafsir yang hitam-putih dan provokatif.

Dari perspektif etika publik, dominasi algoritma dalam menentukan visibilitas tafsir Qur'ani menimbulkan persoalan serius. Ruang publik digital yang seharusnya menjadi arena dialog rasional dan etis justru berpotensi terfragmentasi ke dalam *echo chambers*, di mana pengguna hanya terpapar pada tafsir yang sejalan dengan preferensi dan afiliasi ideologisnya.²⁵ Situasi ini tidak hanya mempersempit cakrawala pemahaman keagamaan, tetapi juga memperkuat polarisasi sosial dan delegitimasi pandangan yang berbeda. Dalam konteks masyarakat Muslim yang plural, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip Qur'ani tentang musyawarah, keadilan, dan pengakuan atas keberagaman sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Lebih jauh, algoritma media sosial secara tidak langsung mendorong komodifikasi dakwah dan tafsir Al-Qur'an. Konten keagamaan tidak lagi sekadar sarana penyampaian nilai, tetapi juga aset ekonomi yang dapat dimonetisasi melalui iklan, sponsor, dan kerja sama komersial. Dalam situasi ini, batas antara dakwah sebagai amanah moral dan dakwah sebagai produk pasar menjadi kabur. Ayat-ayat Al-Qur'an berisiko direduksi menjadi "branding religius" yang kehilangan dimensi transendennya.²⁶ Perspektif etika tafsir menuntut kewaspadaan kritis terhadap kecenderungan ini, karena penafsiran wahyu pada dasarnya merupakan aktivitas amanah yang membawa konsekuensi moral, bukan sekadar strategi komunikasi.

Meski demikian, menempatkan algoritma semata-mata sebagai ancaman juga berisiko menyederhanakan persoalan. Media sosial tetap menyediakan peluang strategis bagi penguatan dakwah Qur'ani yang beretika, inklusif, dan kontekstual, apabila digunakan dengan kesadaran metodologis dan etis.²⁷ Tantangannya bukan pada teknologi itu sendiri, melainkan pada absennya kerangka normatif yang membimbing interaksi antara penafsir, teks, dan publik. Dalam hal ini, ulama dan akademisi tafsir dituntut untuk tidak sekadar mengkritik media sosial dari luar, tetapi juga terlibat aktif dalam merumuskan model dakwah digital yang sejalan dengan prinsip-prinsip etika publik Qur'ani.

²⁴ Pauline Hope Cheong, Shirlena Huang, and Jessie PH Poon, "Religious Communication and Epistemic Authority of Leaders in Wired Faith Organizations," *Journal of Communication* 61, no. 2 (2011): 938-958.

²⁵ Simone Chambers, "Deliberative Democracy and the Digital Public Sphere: Asymmetrical Fragmentation as a Political Not a Technological Problem," *Constellations: An International Journal of Critical & Democratic* 30, no. 1 (2023).

²⁶ Seyed Amir Hossein Asghari, "Understanding Human Dignity in Shi'i Islam: Debates, Challenges, and Solutions for Contemporary Issues," *Religions* 14, no. 4 (2023): 505.

²⁷ Esor Abdulrohim and et al., "Islamic Communication in the 21st Century: Principles, Methods, Practices, Digital Transformation and Contemporary Applications," *Bulletin of Islamic Research* 3, no. 4 (2025): 571-594.

Oleh karena itu, relasi antara otoritas keagamaan dan algoritma media sosial perlu dibaca secara dialektis. Algoritma memang telah menggeser mekanisme otoritas tradisional, tetapi ia tidak serta-merta menghapus kebutuhan akan legitimasi keilmuan dan etika penafsiran. Justru dalam situasi inilah urgensi rekonstruksi otoritas tafsir menjadi semakin nyata: bukan dengan mengembalikan dominasi otoritas lama secara eksklusif, melainkan dengan mengintegrasikan kompetensi keilmuan, kepekaan etis, dan literasi digital. Tanpa upaya tersebut, tafsir populer berisiko menjadi alat reproduksi kekuasaan simbolik yang bertentangan dengan tujuan etis Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kemaslahatan manusia.

Etika Publik dalam Perspektif Al-Qur'an

Etika publik dalam perspektif Al-Qur'an berangkat dari pandangan bahwa wahyu tidak hanya mengatur relasi individual antara manusia dan Tuhan, tetapi juga membentuk tata nilai sosial yang mengarahkan kehidupan bersama secara adil, bermartabat, dan berkeadaban. Al-Qur'an memposisikan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam jaringan relasi publik, sehingga setiap ekspresi keagamaan termasuk tafsir juga memiliki implikasi etis yang melampaui ranah privat.²⁸ Dalam konteks ini, etika publik Qur'ani dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip normatif yang menuntun bagaimana nilai-nilai wahyu diartikulasikan dan dipraktikkan dalam ruang publik yang plural dan dinamis.

Salah satu *prinsip utama* etika publik dalam Al-Qur'an adalah keadilan (*al-'adl*) sebagai fondasi relasi sosial. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan hukum formal, tetapi juga sebagai komitmen moral untuk menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan tidak melampaui batas.²⁹ Dalam konteks tafsir populer, prinsip ini menuntut agar penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tidak digunakan untuk melegitimasi diskriminasi, kekerasan simbolik, atau delegitimasi kelompok lain.³⁰ Penafsiran yang adil harus mempertimbangkan konteks historis, tujuan etis, dan dampak sosial dari makna yang disampaikan kepada publik sebagaimana tercantum di dalam firman Allah Q.S. al-Nahl [16]: 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Prinsip *kedua* yang tak kalah penting adalah moderasi (*wasatiyyah*), yang menegaskan posisi umat Islam sebagai komunitas penengah yang menjauhi sikap ekstrem dan reduksionistik. Moderasi Qur'ani bukan berarti relativisme tanpa batas, melainkan

²⁸ M. Taufiq Hidayah Tanjung and Abdullah Abdullah, "The Concept of Communication in the Quran; Analysis of Theory and Practice," *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)* 5, no. 1 (2025): 72–85.

²⁹ Muḥammad ibn Aḥmad Al-Qurṭubī, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah, 1996), hal. 411.

³⁰ Mohammed Arkoun, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought* (London: Saqi Books, 2002), hal. 37.

keseimbangan antara keteguhan nilai dan keterbukaan dialog.³¹ Dalam ruang publik digital yang sarat polarisasi, prinsip wasatiyyah menjadi landasan etis untuk menghindari tafsir yang hitam-putih dan provokatif.³² Tafsir populer yang beretika publik harus mampu menyampaikan pesan normatif Al-Qur'an tanpa meniadakan kompleksitas realitas sosial dan keberagaman penafsiran yang sah sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah [2]: 143 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Selain keadilan dan moderasi, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam berbicara di ruang publik. Ayat-ayat tentang *qawl sadīd*, *qawl ma'rūf*, dan larangan menyebarkan prasangka serta kebencian menunjukkan bahwa komunikasi publik dalam Islam memiliki dimensi etis yang ketat.³³ Prinsip ini sangat relevan dalam konteks media sosial, di mana ujaran keagamaan dapat menyebar luas dan berdampak cepat.³⁴ Tafsir yang disampaikan tanpa kehati-hatian berpotensi melahirkan kesalahpahaman kolektif dan konflik sosial. Oleh karena itu, etika publik Qur'ani menuntut adanya kesadaran akan konsekuensi sosial dari setiap penafsiran yang dipublikasikan, Allah berfirman dalam kitabnya Q.S. al-Aḥzāb [33]: 70, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Kerangka etika publik Qur'ani juga dapat diperkaya melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum dan ajaran Islam. Dalam perspektif maqāṣid, penafsiran Al-Qur'an dinilai bukan hanya dari kesesuaian tekstual, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan nilai-nilai dasar seperti kehidupan, akal, martabat, dan kohesi sosial.³⁵ Tafsir populer yang mengabaikan dimensi maqāṣid berisiko melahirkan pembacaan literal yang kering secara etis dan destruktif secara sosial. Sebaliknya, *integrasi maqāṣid* dalam tafsir populer memungkinkan dakwah Qur'ani berfungsi sebagai kekuatan moral yang membangun, bukan memecah belah.³⁶

Dalam konteks ruang publik modern, etika publik Qur'ani juga menuntut kemampuan berdialog dengan prinsip-prinsip etika universal tanpa kehilangan identitas normatifnya. Al-Qur'an mengakui keberagaman manusia sebagai fakta

³¹ Muhammad Ibnu Jarir Al-Ṭabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001).

³² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), hal. 89.

³³ Imaduddin Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999), hal. 338.

³⁴ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: The University of Chicago Press, 1980), 63.

³⁵ Jasser Auda, *Maqaṣid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hal. 139.

³⁶ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Juz II* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, n.d.), hal. 71.

ontologis dan menjadikannya dasar untuk saling mengenal dan bekerja sama.³⁷ Prinsip ini relevan untuk membangun tafsir populer yang inklusif dan komunikatif, terutama dalam masyarakat multikultural yang diwarnai oleh perbedaan keyakinan dan pandangan hidup.³⁸ Tafsir yang berorientasi etika publik tidak memosisikan Al-Qur'an sebagai alat eksklusif, melainkan sebagai sumber nilai yang berkontribusi bagi kebaikan bersama (*common good*) sebagaimana Allah sebutkan dalam kitabnya Q.S. al-Hujurat [49]: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Dengan demikian, etika publik dalam perspektif Al-Qur'an menyediakan kerangka normatif yang kokoh untuk mengevaluasi dan merekonstruksi tafsir populer di media sosial. Prinsip-prinsip seperti keadilan, moderasi, tanggung jawab moral, dan orientasi maqāsid dapat berfungsi sebagai kompas etis yang menuntun praktik penafsiran dalam ruang publik digital. Tanpa kerangka ini, tafsir populer berisiko terjebak dalam logika viralitas yang mengaburkan tujuan etik Al-Qur'an. Sebaliknya, dengan menjadikan etika publik sebagai landasan, tafsir populer dapat menjadi sarana dakwah Qur'ani yang relevan, berkeadaban, dan transformatif.

Problematisasi Reduksionisme dan Polarisasi Makna

Salah satu problem paling menonjol dalam praktik tafsir populer di media sosial adalah kecenderungan reduksionisme makna, yakni penyempitan pesan Al-Qur'an menjadi formula normatif yang sederhana dan sering kali ahistoris. Reduksionisme ini muncul ketika ayat-ayat Al-Qur'an dipisahkan dari konteks pewayhuan, struktur wacana, dan tujuan etisnya, lalu disajikan sebagai dalil instan untuk menjawab persoalan kompleks.³⁹ Dalam logika media sosial yang menuntut kecepatan dan keringkasan, kompleksitas tafsir sering dipersempit menjadi slogan religius yang mudah dikonsumsi, tetapi miskin kedalaman epistemologis.

Reduksionisme makna juga berkaitan erat dengan praktik selektivitas ayat, di mana penafsir populer cenderung memilih ayat-ayat tertentu yang dianggap paling sesuai dengan pesan yang hendak disampaikan, sembari mengabaikan ayat lain yang memberikan nuansa penyeimbang.⁴⁰ Pola ini berpotensi menghasilkan pembacaan parsial yang tidak hanya menyederhanakan secara metodologis, tetapi juga problematis secara etis. Dalam perspektif ilmu tafsir, pembacaan Al-Qur'an yang terpotong-potong bertentangan dengan prinsip al-Qur'ān *yufassiru ba'duhu ba'dan*,

³⁷ Muhammad Tang, H Hasbullah, and S Sudirman, "Cultural Diversity in Al-Qur'an Perspective," *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 1, no. 2 (2018): 27-34.

³⁸ Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979), hal. 79.

³⁹ Adam Flowers, "Reconsidering Qur'anic Genre," *Journal of Qur'anic Studies* 20, no. 2 (2018): 19-46.

⁴⁰ Masaomi Kondo and Helen Tebble, "Intercultural Communication, Negotiation and Interpreting," in *Conference Interpreting: Current Trends in Research. Proceedings of the International Conference on Interpreting: What Do We Know and How* (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2011), 149.

yakni pemahaman bahwa ayat-ayat Al-Qur'an saling menafsirkan dalam satu kesatuan makna.⁴¹

Di ruang publik digital, reduksionisme tafsir sering kali berkelindan dengan polarisasi makna. Polarisasi terjadi ketika tafsir Qur'ani diposisikan dalam kerangka oposisi biner yakni benar versus salah, iman versus kufur, kita versus mereka.⁴² Semua itu dilakukan tanpa ruang bagi ambiguitas dan dialog. Tafsir semacam ini memperoleh daya tarik tinggi di media sosial karena mampu memobilisasi emosi kolektif dan memperkuat identitas kelompok. Namun, dari sudut pandang etika publik, polarisasi makna justru menggerus kapasitas masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati.⁴³

Dampak sosial dari reduksionisme dan polarisasi tafsir tidak dapat diremehkan. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an digunakan untuk mengukuhkan klaim kebenaran eksklusif, ruang publik berubah menjadi arena kontestasi simbolik yang sarat dengan kecurigaan dan antagonisme. Dalam situasi ini, tafsir Qur'ani kehilangan fungsi etisnya sebagai sumber pencerahan dan transformasi moral, dan justru berpotensi menjadi instrumen legitimasi konflik.⁴⁴ Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang menuntun manusia menuju keadilan dan kedamaian sosial sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya Q.S. al-Anbiyā' [21]: 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dari perspektif hermeneutika Qur'ani, reduksionisme makna menunjukkan absennya kesadaran historis dan kontekstual dalam membaca teks wahyu. Para mufassir klasik menegaskan pentingnya memahami konteks sosial-budaya Arab awal, struktur bahasa, dan tujuan normatif ayat sebelum menarik kesimpulan hukum atau moral. Tafsir populer yang mengabaikan dimensi ini berisiko memproduksi makna yang tidak hanya ahistoris, tetapi juga tidak relevan dengan kompleksitas realitas kontemporer.⁴⁵ Akibatnya, Al-Qur'an tampil sebagai teks yang kaku dan normatif secara sempit, bukan sebagai sumber nilai yang dinamis dan kontekstual.

Lebih jauh, polarisasi tafsir di media sosial diperkuat oleh mekanisme *echo chamber* dan *filter bubble*, di mana pengguna cenderung terpapar pada konten yang sejalan dengan preferensi ideologisnya. Dalam situasi ini, tafsir Qur'ani tidak lagi menjadi sarana dialog lintas pandangan, melainkan alat konfirmasi identitas

⁴¹ Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasyi, *Al Burhan Fi Ulum Al Qur'an* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007), hal. 216.

⁴² Sebastian Seignani, "Digital Transformations and the Ideological Formation of the Public Sphere: Hegemonic, Populist, or Popular Communication?," *Theory, Culture & Society* 39, no. 4 (2022): 91-109.

⁴³ Stefania Milan, "From Social Movements to Cloud Protest: The Evolution of Collective Identity," *Information, Communication & Society* 18, no. 8 (2015): 887-900.

⁴⁴ Mohammad Takdir, "Contestation and the Roles of Islam in the Public Sphere: A Sociological Analysis of Religious Secularization in Indonesia and the West," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020): 154-74.

⁴⁵ Ali Muhammad Bhat, "The Quranic Hermeneutics: Unity in Text, Diversity in Interpretation," *Journal of Quranic Sciences and Research* 6, no. 1 (2025): 36-46.

kelompok.⁴⁶ Etika publik Qur'ani menuntut pembacaan yang melampaui logika eksklusivisme ini, dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber nilai yang mendorong refleksi diri, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan.

Oleh karena itu, problem reduksionisme dan polarisasi makna dalam tafsir populer perlu dibaca sebagai tantangan serius bagi dakwah Qur'ani di era media sosial. Solusi terhadap problem ini tidak cukup dengan seruan moral semata, tetapi memerlukan rekonstruksi metodologis dan etis dalam praktik penafsiran publik. Tafsir populer harus diarahkan untuk tidak hanya komunikatif dan relevan, tetapi juga bertanggung jawab secara epistemologis dan etis. Tanpa upaya tersebut, tafsir Qur'ani berisiko kehilangan daya integratifnya dalam membangun kohesi sosial dan etika publik yang berkeadaban.

Dakwah Qur'ani antara Popularitas dan Tanggung Jawab Moral

Dakwah Qur'ani di era media sosial berada dalam ketegangan inheren antara tuntutan popularitas dan tanggung jawab moral. Di satu sisi, media sosial membuka peluang luas bagi penyebaran pesan Al-Qur'an secara cepat dan masif, memungkinkan dakwah menjangkau audiens yang sebelumnya sulit disentuh oleh institusi keagamaan formal. Di sisi lain, logika popularitas yang mengatur ruang digital sering kali mendorong pendangkalan pesan, simplifikasi makna, dan kompromi etis demi visibilitas.⁴⁷ Ketegangan ini menempatkan pendakwah dan penafsir Al-Qur'an dalam dilema moral yang tidak sederhana: bagaimana tetap relevan tanpa mengorbankan integritas epistemologis dan etika publik.

Dalam perspektif etika dakwah, popularitas bukanlah tujuan, melainkan konsekuensi potensial dari penyampaian pesan yang bermakna dan bertanggung jawab. Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa kebenaran tidak selalu sejalan dengan kehendak mayoritas, dan bahwa tugas penyampai wahyu adalah menyampaikan amanah, bukan mengejar pengakuan sosial.⁴⁸ Prinsip ini mengandung implikasi etis yang mendalam bagi praktik dakwah digital, di mana metrik kesuksesan sering kali direduksi menjadi jumlah pengikut, tayangan, dan likes. Ketika popularitas dijadikan ukuran utama, dakwah berisiko bergeser dari amanah moral menjadi performa publik sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-An'ām [6]: 116 yang berbunyi:

وَأِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ خَلَوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

Pendakwah Qur'ani di ruang publik digital pada dasarnya berfungsi sebagai agen moral publik, yakni individu yang tidak hanya menyampaikan teks keagamaan, tetapi juga membentuk horizon etis audiensnya. Setiap tafsir yang

⁴⁶ Hanan Ibrahim, "Approaches to Reading Intercultural Communication in the Qur'an and the Politics of Interpretation," *Critical Research on Religion* 2, no. 2 (2014): 99-115.

⁴⁷ Abdul Shaban, "Digitalization, Cultural Production, Exchange, and Consumption," in *Digital Geographies-Urbanisation, Economy, and Modelling: A Machine-Generated Literature Review* (Singapura: Springer Nature Singapore, 2024), 319-598.

⁴⁸ Fauzi Eka Putra and Mami Nofrianti, "Analysis of the Principles of Communication in the Perspective of the Qur'an," *Semantik: Journal of Social, Media, Communication, and Journalism* 2, no. 1 (2024): 65-73.

dipublikasikan membawa implikasi sosial, karena ia memengaruhi cara publik memahami diri, orang lain, dan realitas sosial.⁴⁹ Oleh karena itu, tanggung jawab moral pendakwah tidak berhenti pada kesesuaian teks, tetapi juga mencakup kesadaran akan dampak sosial dari pesan yang disampaikan. Tafsir yang memicu kebencian, polarisasi, atau delegitimasi kelompok lain, meskipun populer, bertentangan dengan tujuan etis dakwah Qur'ani (Kamali, 2019; An-Na'im, 2008).

Lebih jauh, etika dakwah Qur'ani menuntut adanya kejujuran epistemologis, yakni kesediaan untuk mengakui keterbatasan pengetahuan dan keragaman penafsiran. Dalam konteks media sosial, di mana pendakwah sering dituntut tampil pasti dan meyakinkan, pengakuan terhadap kompleksitas tafsir sering dianggap sebagai kelemahan. Padahal, dalam tradisi keilmuan Islam, kehati-hatian dan kerendahan hati intelektual merupakan bagian integral dari etika penafsiran.⁵⁰ Menghadirkan nuansa dan perbedaan pendapat dalam tafsir populer justru dapat menjadi praktik etis yang memperkaya pemahaman publik, meskipun tidak selalu sejalan dengan logika viralitas.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah komodifikasi dakwah, di mana popularitas pendakwah di media sosial dikonversi menjadi kapital simbolik dan ekonomi. Praktik ini menimbulkan pertanyaan etis tentang batas antara dakwah sebagai amanah dan dakwah sebagai profesi. Meskipun Islam tidak menafikan aspek material dalam kehidupan, etika publik Qur'ani menuntut agar kepentingan ekonomi tidak mendistorsi pesan wahyu. Ketika tafsir Al-Qur'an disesuaikan dengan kepentingan sponsor atau pasar, risiko kompromi moral menjadi semakin besar.⁵¹ Dalam konteks ini, integritas dakwah diuji bukan oleh kritik publik, tetapi oleh godaan internal untuk mengorbankan nilai demi keuntungan.

Namun demikian, menempatkan popularitas dan tanggung jawab moral sebagai oposisi biner juga tidak sepenuhnya tepat. Popularitas dapat menjadi sarana efektif bagi dakwah Qur'ani apabila dikelola dengan kesadaran etis dan komitmen epistemologis yang kuat. Tantangannya adalah merumuskan strategi dakwah digital yang mampu memanfaatkan potensi media sosial tanpa terjebak dalam logika reduksionisme dan polarisasi.⁵² Dalam hal ini, pendakwah dan akademisi tafsir dituntut untuk mengembangkan model komunikasi Qur'ani yang komunikatif sekaligus reflektif, populer namun tetap berakar pada prinsip-prinsip etika publik.

Dengan demikian, dilema antara popularitas dan tanggung jawab moral bukanlah persoalan teknis semata, melainkan problem etis yang menuntut refleksi mendalam tentang tujuan dakwah Qur'ani itu sendiri. Apakah dakwah dimaksudkan untuk memenangkan atensi publik, atau untuk membentuk kesadaran etis yang berkelanjutan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah tafsir

⁴⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd Ed.) (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hal. 143.

⁵⁰ Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*...hal, 412.

⁵¹ Ventsislav Popivanov, "Challenges To Traditional Preaching Practice In Contemporary Society And Media," in *Education, Society, Family. Interdisciplinary Perspectives and Analyses* (Romania: Editura Eikon, 2021), 138–145.

⁵² Zulfa Ilma Nuriana and Nisrina Salwa, "Digital Da'wah in the Age of Algorithm: A Narrative Review of Communication, Moderation, and Inclusion," *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 4 (2024): 242–256.

populer di media sosial, sekaligus kualitas kontribusinya terhadap kehidupan publik yang adil dan berkeadaban.

Rekonstruksi Kerangka Etika Tafsir di Ruang Publik Digital

Berangkat dari problematika tafsir populer, pergeseran otoritas keagamaan, serta tantangan etika publik di era media sosial, diperlukan suatu rekonstruksi kerangka etika tafsir yang mampu menjawab dinamika ruang publik digital tanpa kehilangan fondasi normatif Al-Qur'an. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan metodologi tafsir klasik, melainkan untuk mengaktualisasikannya dalam konteks komunikasi publik kontemporer yang ditandai oleh kecepatan, keterbukaan, dan pluralitas audiens.⁵³ Dengan kata lain, etika tafsir di ruang publik digital harus dipahami sebagai perluasan tanggung jawab penafsiran, bukan penyederhanaannya.

Langkah **pertama** dalam rekonstruksi ini adalah menegaskan kembali tafsir sebagai amanah publik. Ketika tafsir Al-Qur'an disampaikan melalui media sosial, ia tidak lagi berada dalam ruang terbatas komunitas ilmiah, tetapi memasuki arena publik yang luas dan heterogen. Konsekuensinya, penafsir memikul tanggung jawab etis yang lebih besar terhadap dampak sosial dari makna yang diproduksi. Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa setiap penafsiran publik bukan hanya klaim epistemologis, tetapi juga tindakan moral yang berpotensi membentuk sikap, persepsi, dan relasi sosial masyarakat.⁵⁴

Kedua, kerangka etika tafsir publik perlu dibangun di atas integrasi metodologi tafsir dan literasi digital. Penguasaan ilmu-ilmu Al-Qur'an seperti bahasa Arab, asbāb al-nuzūl, dan *qawā'id al-tafsīr* tetap menjadi prasyarat utama, namun tidak lagi cukup. Penafsir Qur'ani di era digital juga dituntut memahami logika media sosial, termasuk mekanisme algoritma, budaya viral, dan potensi distorsi makna. Literasi digital dalam konteks ini bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi kesadaran kritis terhadap bagaimana medium memengaruhi pesan dan resepsinya di ruang publik.⁵⁵

Ketiga, etika tafsir publik harus berorientasi pada maqāsid al-sharī'ah dan kemaslahatan sosial. Rekonstruksi tafsir populer yang beretika menuntut pergeseran fokus dari sekadar penegasan hukum atau identitas menuju perlindungan nilai-nilai dasar kemanusiaan, seperti martabat, keadilan, dan kohesi sosial. Dalam perspektif ini, tafsir yang benar secara tekstual tetapi destruktif secara sosial perlu dikritisi secara etis. Sebaliknya, tafsir yang mendorong empati, dialog, dan keadilan sosial dapat dipandang lebih sejalan dengan tujuan normatif Al-Qur'an, meskipun disampaikan dalam format populer.⁵⁶

⁵³ Mohammad Fattahun Niam, "From Sanad to Syntax: The Disruption of Islamic Hermeneutics by Qur'anGPT," *Basmala: Journal of Qur'an and Hadith* 1, no. 1 (2025): 46-67.

⁵⁴ Allen Buchanan, "Social Moral Epistemology," *Social Philosophy and Policy* 19, no. 2 (2002): 126-152.

⁵⁵ Luciana Pangrazio, "Reconceptualising Critical Digital Literacy," *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education* 37, no. 2 (2016): 163-174.

⁵⁶ Jamil Akhtar, "Social Justice and Equality in the Qur'an: Implications for Global Peace," *Edinost in Dialog: Revija Za Ekumensko Teologijo in Medreligijski Dialog* 79, no. 1 (2024): 23-45.

Keempat, rekonstruksi etika tafsir di ruang publik digital menuntut penguatan kesadaran pluralitas penafsiran. Al-Qur'an dalam sejarahnya telah melahirkan keragaman tafsir yang sah dan produktif. Kesadaran ini penting untuk mencegah klaim kebenaran tunggal yang sering kali diperkuat oleh logika media sosial. Tafsir populer yang beretika publik tidak menutup ruang perbedaan, tetapi justru mengedukasi publik tentang adanya spektrum makna dan pendekatan dalam memahami teks wahyu. Praktik ini sejalan dengan etika dialog Qur'ani yang menghargai perbedaan dan mendorong musyawarah.⁵⁷

Kelima, kerangka etika tafsir publik perlu diwujudkan dalam prinsip-prinsip operasional dakwah digital. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: kehati-hatian dalam mengutip ayat, transparansi sumber dan rujukan tafsir, penghindaran bahasa provokatif dan stigmatisasi, serta kesediaan untuk melakukan koreksi dan klarifikasi di ruang publik. Prinsip operasional ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi pendakwah, tetapi juga sebagai instrumen edukatif bagi publik agar lebih kritis dalam mengonsumsi tafsir Qur'ani di media sosial.⁵⁸

Dengan demikian, rekonstruksi etika tafsir di ruang publik digital merupakan upaya strategis untuk menjembatani ketegangan antara popularitas dan tanggung jawab moral dalam dakwah Qur'ani. Kerangka ini menegaskan bahwa tafsir populer tidak harus identik dengan pendangkalan makna atau kompromi etis. Sebaliknya, dengan fondasi metodologis yang kuat dan orientasi etika publik yang jelas, tafsir populer justru dapat menjadi medium transformasi nilai Qur'ani yang relevan, inklusif, dan berdaya guna bagi masyarakat kontemporer.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa dakwah Qur'ani di era media sosial tidak dapat dipahami sekadar sebagai transformasi medium komunikasi, melainkan sebagai pergeseran paradigmatis dalam produksi, distribusi, dan legitimasi makna Al-Qur'an di ruang publik. Munculnya tafsir populer memperlihatkan ketegangan antara demokratisasi akses terhadap wahyu dan melemahnya kontrol epistemologis serta etis dalam penafsiran. Dalam konteks ini, Al-Qur'an berisiko direduksi menjadi simbol normatif yang tunduk pada logika algoritma, popularitas, dan polarisasi, sehingga kehilangan daya reflektif dan transformatifnya sebagai petunjuk moral bagi kehidupan sosial.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa problem utama tafsir populer bukan terletak pada kesederhanaan bahasa atau format digitalnya, melainkan pada absennya kerangka etika publik yang membimbing praktik penafsiran di ruang terbuka yang plural. Ketika tafsir dilepaskan dari prinsip keadilan, moderasi,

⁵⁷ Asma Afsaruddin, "Valorizing Religious Dialogue and Pluralism Within the Islamic Tradition," in *Pluralism in Islamic Contexts-Ethics, Politics and Modern Challenges* (Cham: Springer International Publishing, 2021), 35-45.

⁵⁸ Pipin Armita, "Digital Da'wah and Quranic Interpretation: Opportunities, Distortions, and Ethics in the Spread of Interpretations on Social Media," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 1 (2025): 154-164.

tanggung jawab moral, dan orientasi maqāṣid al-sharī'ah, ia berpotensi melahirkan reduksionisme makna, fragmentasi otoritas keagamaan, serta polarisasi sosial. Sebaliknya, integrasi etika publik Qur'ani memungkinkan tafsir populer berfungsi sebagai jembatan antara khazanah tafsir akademik dan kebutuhan spiritual masyarakat kontemporer tanpa mengorbankan integritas keilmuan.

Dengan demikian, rekonstruksi etika tafsir di ruang publik digital merupakan agenda mendesak dalam studi tafsir kontemporer dan praktik dakwah Islam. Tafsir Al-Qur'an perlu ditegaskan kembali sebagai amanah publik yang menuntut kehati-hatian epistemologis dan sensitivitas etis terhadap dampak sosialnya. Melalui penguatan kesadaran metodologis, literasi digital, dan orientasi kemaslahatan, dakwah Qur'ani di media sosial tidak hanya dapat tetap relevan, tetapi juga berkontribusi secara nyata dalam membangun ruang publik yang adil, inklusif, dan berkeadaban, sejalan dengan spirit Al-Qur'an sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Saran

Sejalan dengan temuan riset ini yang telah membukakan gerbang bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris maupun komparatif di masa mendatang, kami sangat menyarankan digunakannya pendekatan netnografi digital atau analisis mahadata (big data) untuk merekam jejak spesifik bagaimana tafsir populer ini direproduksi dan dikonsumsi pada platform berkecepatan tinggi seperti TikTok atau Instagram. Lebih dari sekadar riset lanjutan, tibalah saatnya kita melakukan "hilirisasi ilmu tafsir" melalui kolaborasi lintas disiplin (mufasir otoritatif, pakar algoritma, dan content creator) guna meracik sebuah prototipe panduan etika dakwah digital yang benar-benar aplikatif; sebuah panduan yang mampu menjinakkan liarnya arus pasar atensi, sehingga pesan suci Al-Qur'an tetap membumi sebagai suluh keadaban publik tanpa harus mengorbankan sakralitas dan kedalaman epistemologisnya di tengah pusaran viralitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Amin. "Islamic Studies in Higher Education in Indonesia: Challenges, Impact and Prospects for the World Community." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 2 (2017): 391–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.391-426>.
- Abdulrohim, Esor, and et al. "Islamic Communication in the 21st Century: Principles, Methods, Practices, Digital Transformation and Contemporary Applications." *Bulletin of Islamic Research* 3, no. 4 (2025): 571–94.
- Abu-Zayd, Nasr. *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Utrecht: Humanistics University Press, 2006.
- Afsaruddin, Asma. "Valorizing Religious Dialogue and Pluralism Within the

- Islamic Tradition.” In *Pluralism in Islamic Contexts-Ethics, Politics and Modern Challenges*, 35–45. Cham: Springer International Publishing, 2021.
- Akhtar, Jamil. “Social Justice and Equality in the Qur’ān: Implications for Global Peace.” *Edinost in Dialog: Revija Za Ekumensko Teologijo in Medreligijski Dialog* 79, no. 1 (2024): 23–45.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin, Juz II*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, n.d.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Da’wah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- Al-Qurtubi, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah, 1996.
- Al-Ṭabari, Muhammad Ibnu Jarir. *Jami’ Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur’an*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2001.
- Al-Zarkasyi, Muhammad bin Abdullah. *Al Burhan Fi Ulum Al Qur’an*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2007.
- Arkoun, Mohammed. *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. New York: Routledge, 1994.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780429304651>.
- . *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. London: Saqi Books, 2002.
- Armita, Pipin. “Digital Da’wah and Quranic Interpretation: Opportunities, Distortions, and Ethics in the Spread of Interpretations on Social Media.” *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 1 (2025): 154–164.
- Asghari, SeyedAmirHossein. “Understanding Human Dignity in Shi’i Islam: Debates, Challenges, and Solutions for Contemporary Issues.” *Religions* 14, no. 4 (2023): 505.
- Ashfiya, Rofiqoh Nurul. “New Direction of the Qur’an Interpretation in Indonesia: A Study of Nadirsyah Hosen’s Interpretation on Social Media.” *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 165–84.
- Auda, Jasser. *Maqaṣid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bhat, Ali Muhammad. “The Quranic Hermeneutics: Unity in Text, Diversity in Interpretation.” *Journal of Quranic Sciences and Research* 6, no. 1 (2025): 36–46.
- Buchanan, Allen. “Social Moral Epistemology.” *Social Philosophy and Policy* 19, no. 2 (2002): 126–52.
- Bunt, Gary R. *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority*. New York: University of North Carolina Press, 2018.
- Campbell, Heidi A., and Ruth Tsuria. *Digital Religion Understanding Religious Practice in Digital Media*. United Kingdom: Routledge, 2022.
- Chambers, Simone. “Deliberative Democracy and the Digital Public Sphere: Asymmetrical Fragmentation as a Political Not a Technological Problem.” *Constellations: An International Journal of Critical & Democratic* 30, no. 1 (2023).
- Cheong, Pauline Hope, Shirlena Huang, and Jessie PH Poon. “Religious Communication and Epistemic Authority of Leaders in Wired Faith Organizations.” *Journal of Communication* 61, no. 2 (2011): 938–958.

- Couldry, Nick. *Media, Society, World : Social Theory and Digital Media Practice*. United Kingdom: Polity Press., 2012.
- Couldry, Nick, and Andreas Hepp. *The Mediated Construction of Reality*. New York: Polity Press, 2016.
- Esack, Farid. *Quran, Liberation & Pluralism*. USA: Oneworld Publications, 2003.
- Faris, Salman. "Exploring the Divine Message: Quranic Studies in the Context of Islamic Scholarship." *Dirasah International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 111-125.
- Flowers, Adam. "Reconsidering Qur'anic Genre." *Journal of Qur'anic Studies* 20, no. 2 (2018): 19–46.
- Gal, Noam. "Ironic Humor on Social Media as Participatory Boundary Work." *New Media & Society* 21, no. 3 (2019): 729–49.
- Hjarvard, Stig. *The Mediatization of Culture and Society*. New York: Routledge, 2013.
- Hoover, Stewart M. *The Media and Religious Authority*. Philadelphia: Penn State University Press, 2016.
- Ibn Kathir, Imaduddin. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.
- Ibrahim, Hanan. "Approaches to Reading Intercultural Communication in the Qur'an and the Politics of Interpretation." *Critical Research on Religion* 2, no. 2 (2014): 99-115.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence (3rd Ed.)*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- . *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Kondo, Masaomi, and Helen Tebble. "Intercultural Communication, Negotiation and Interpreting." In *Conference Interpreting: Current Trends in Research. Proceedings of the International Conference on Interpreting: What Do We Know and How*, 149. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2011.
- Milan, Stefania. "From Social Movements to Cloud Protesting: The Evolution of Collective Identity." *Information, Communication & Society* 18, no. 8 (2015): 887-900.
- Niam, Mohammad Fattahun. "From Sanad to Syntax: The Disruption of Islamic Hermeneutics by Qur'anGPT." *Basmala: Journal of Qur'an and Hadith* 1, no. 1 (2025): 46-67.
- Nisa, Eva F. "Creative and Lucrative Da'wa: The Visual Culture of Instagram amongst Female Muslim Youth in Indonesia." *Asiascape: Digital Asia* 5, no. 1–2 (2018): 68-99.
- Nuriana, Zulfa Ilma, and Nisrina Salwa. "Digital Da'wah in the Age of Algorithm: A Narrative Review of Communication, Moderation, and Inclusion." *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 4 (2024): 242-256.
- Pangrazio, Luciana. "Reconceptualising Critical Digital Literacy." *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education* 37, no. 2 (2016): 163–74.
- Piazza, Jared, and Justin F. Landy. "Lean Not on Your Own Understanding": Belief That Morality Is Founded on Divine Authority and Non-Utilitarian Moral Judgments." *Judgment and Decision Making* 8, no. 6 (2013): 639-661.

- Popivanov, Ventsislav. "Challenges To Traditional Preaching Practice In Contemporary Society And Media." In *Education, Society, Family. Interdisciplinary Perspectives and Analyses*, 138–45. Romania: Editura Eikon, 2021.
- Putra, Fauzi Eka, and Mami Nofrianti. "Analysis of the Principles of Communication in the Perspective of the Qur'an." *Semantik: Journal of Social, Media, Communication, and Journalism* 2, no. 1 (2024): 65–73.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
- . *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- . *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: The University of Chicago Press, 1980.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Schuster, Nick, and Seth Lazar. "Attention, Moral Skill, and Algorithmic Recommendation." *Philosophical Studies* 182, no. 1 (2025): 159–184.
- Sevignani, Sebastian. "Digital Transformations and the Ideological Formation of the Public Sphere: Hegemonic, Populist, or Popular Communication?" *Theory, Culture & Society* 39, no. 4 (2022): 91–109.
- Shaban, Abdul. "Digitalization, Cultural Production, Exchange, and Consumption." In *Digital Geographies-Urbanisation, Economy, and Modelling: A Machine-Generated Literature Review*, 319–598. Singapura: Springer Nature Singapore, 2024.
- Takdir, Mohammad. "Contestation and the Roles of Islam in the Public Sphere: A Sociological Analysis of Religious Secularization in Indonesia and the West." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020): 154–74.
- Tang, Muhammad, H Hasbullah, and S Sudirman. "Cultural Diversity in Al-Qur'an Perspective." *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 1, no. 2 (2018): 27–34.
- Tanjung, M. Taufiq Hidayah, and Abdullah Abdullah. "The Concept of Communication in the Quran; Analysis of Theory and Practice." *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)* 5, no. 1 (2025): 72–85.
- Turner, Bryan S. *Religion and Modern Society: Citizenship, Secularisation and the State*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2011.
- Ullah, Ahsan, and Kanwal Ameen. "Account of Methodologies and Methods Applied in LIS Research: A Systematic Review." *Library & Information Science Research* 40, no. 1 (2018): 53–60.
- Yilmaz, Ihsan. "Faith in the Digital Age: How Young Muslims Use the Cyberspace for Islamic Knowledge." In *Between Clicks and Clerics: How Young Western Muslims Seek Religious Knowledge in the Digital Age*, 63–121. Singapura: Springer Nature Singapore, 2025.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: AN OBSERVER BEST BOOK OF THE CENTURY*. New York: PublicAffairs, 2019.